



Pemprov Fokus Benahi Aset

PONTIANAK, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalbar terus berbenah menyelesaikan catatan dari BPK RI sebagai upaya mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2015 ini.

"Kita sudah melakukan rapat kerja dengan BPK Perwakilan Kalbar, membahas pemeriksaan pendahuluan terkait pengelolaan kekayaan dan aset daerah. Dalam pertemuan itu, kita diingatkan kembali untuk memperbaiki beberapa catatan yang diberikan oleh BPK," kata Wakil Gubernur Kalbar Christiandy

Sanjaya, Sabtu (14/3).

Dia mengatakan, meski Pemprov Kalbar mendapat predikat WTP dua tahun berturut-turut, namun masih ada catatan yang menjadi pekerjaan rumah dari BPK RI untuk segera diselesaikan guna mempertahankan predikat tersebut.

Christiandy menjelaskan, beberapa kesulitan yang dihadapi oleh Pemprov Kalbar untuk menyelesaikan catatan dari BPK tersebut diantaranya masih banyak aset Pemprov yang ada daerah kabupaten/kota, namun dokumennya berada di daerah terkait,

bahkan ada juga yang berada di pusat.

"Namun, kita akan terus berupaya agar semua cacatan yang diberikan oleh BPK itu bisa kita selesaikan dan kita akan berusaha untuk maksimal guna mempertahankan WTP tersebut," katanya.

Dari hasil pertemuan itu juga, BPK memberikan penekanan kepada Pemprov Kalbar agar bisa merawat berbagai aset yang ada agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, pihaknya meminta agar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi setempat

■ Bersambung ke Hal. 19

Pemprov Fokus Benahi Aset

Sambungan Hal. 9

meningkatkan perbaikan administrasi dan laporan keuangan untuk mempertahankan penilaian WTP oleh BPK RI.

"Sejak 2013, menjadi awal sejarah baru bagi Pemprov Kalbar dimana kita bisa mendapatkan penilaian WTP dari BPK. Walaupun pada saat itu ada beberapa catatan yang diberikan BPK. Kemudian pada tahun 2014, kembali mendapatkan WTP tentu dengan catatan yang tidak terlalu banyak," katanya.

Terkait hal tersebut dia mengharapkan agar setiap SKPD yang ada di Kalbar bisa meningkatkan kinerja pegawai administrasi agar bisa memberikan laporan terbaik kepada petugas BPK untuk menghindari adanya

kesalahan dari pelaporan yang diberikan.

"Kami sudah melakukan pertemuan dengan kepala SKPD yang ada di jajaran Pemprov Kalbar dan BPK RI perwakilan Kalbar. Terhitung sejak 10 Februari sampai 15 Maret lalu kita juga telah diaudit BPK RI. Kami sudah komitmen bagaimana menjalankan itu dengan baik, agar bisa memberikan laporan baik untuk mempertahankan opini WTP dari BPK RI," tuturnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kalbar Lutfi A Hadi mempertanyakan predikat WTP yang didapat Pemprov Kalbar dari BPK lantaran masih banyak aset-aset Pemprov yang tidak terurus.

"Seharusnya dengan

mendapat WTP, masalah aset sudah *clear* semua. Tidak ada lagi yang terbengkalai. Coba lihat, aset-aset masih banyak tidak terawat. Jadi ada apa WTP itu," ujar Lutfi.

Anggota Fraksi Partai Nasdem ini menjelaskan, berdasarkan hasil reses di Kapuas Hulu, banyak aset miliknya Pemprov yang tidak terawat. Bangunan milik Pemprov tak diurus dengan baik.

"Setelah kita pulang dari reses, kami langsung melakukan rapat bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Kalbar. Mereka menjelaskan, selama ini pihaknya masih dalam proses mendata aset-aset Pemprov yang ada di kabupaten. Padahal ini aset

puluhan tahun, mengapa baru di data," tuturnya.

Menurut Lutfi, kalau Pemprov tak mampu mengurus atau merawat aset, lebih baik dihibahkan ke daerah agar aset tersebut terawat dengan baik.

"Kalau kami lihat, masih banyak aset milik Pemprov di kabupaten dan kota belum di data dengan maksimal. Baik itu jumlah luas tanah dan harta benda lainnya," jelasnya.

Ia berharap, Pemprov Kalbar mempercepat proses pendataan aset. "Waktu itu alasan mereka, kewalahan mendata karena terlalu banyak aset," ungkap dewan dari Dapil tujuh meliputi Melawi, Kapuas Hulu dan Singtang ini. (ant/rul)